

Sumber: <http://www.kr.co.id/article.php?sid=130899>  
Tuesday, 17 July 2007, [Rubrikasi](#) - [Analisis](#)



## Unbalanced Growth

Oleh: Mudrajad Kuncoro

Presiden SBY menginginkan pembangunan di daerah senafas dengan pemerintah pusat. Demikian diamanatkan oleh presiden setelah mendengar laporan menteri-menterinya mengenai perkembangan ekonomi semester I 2007. Masalahnya apakah selama ini pembangunan di berbagai daerah tidak seirama dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat?

Bank Indonesia dalam "Laporan Perekonomian Indonesia 2006" mencatat pertumbuhan ekonomi wilayah Jakarta-Banten, Jabalnusra (Jawa Bali Nusa Tenggara), dan Sumatra di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pertumbuhan ekonomi rata-rata pasca krisis tercatat 4,5% secara nasional, namun bervariasi antar daerah. Ada daerah yang mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, namun banyak daerah yang tumbuh lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai lebih dari 6% per tahun, sementara Maluku mengalami kontraksi negatif lebih dari -25% pada saat konflik.

Inilah yang disebut para ahli pembangunan sebagai *unbalanced growth*, pertumbuhan yang tidak merata antardaerah dan kawasan di Indonesia. Faktanya ketika ekonomi nasional tumbuh 5,5% tahun 2006, Propinsi DIY hanya tumbuh 3,7%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi DIY dapat dipastikan merupakan dampak gempa bumi Mei 2006. Di DIY, rekonstruksi bangunan dan infrastruktur dengan guyuran dana dari pemerintah pusat dan negara donor menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi pascagempa.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perbaikan pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Kenyataannya, dilihat dari dimensi distribusi, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2006 memang meningkat menjadi \$1.663, namun ketimpangan distribusi pendapatan juga meningkat.

Ada dua indikator yang menunjukkan belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dilihat dari dimensi bagaimana "kue nasional" dibagi. Pembagian kue nasional diukur dengan: Pertama, rasio gini yang meningkat dari 0,29 pada tahun 2002 menjadi 0,35 pada tahun 2006. Angka rasio gini yang semakin meningkat berarti terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang makin lebar. Analisis saya menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antar daerah dan sektor (*Investor Daily*, 2007).

Kedua, kue nasional yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk termiskin mengalami penurunan dari 20,92 tahun 2002 menjadi 19,2 pada tahun 2006. Ironisnya, penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40% penduduk termiskin justru diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati oleh 20% kelompok terkaya dari 44,7% menjadi 45,7% pada tahun yang sama. Singkatnya, ada indikasi kuat adanya *trickle up effect*, efek muncrat ke atas, dalam proses pembangunan di Indonesia. Teori dampak menetes ke bawah (*trickle down effect*) agaknya tidak berlaku untuk negeri kita.

Pertanyaannya, mengapa terjadi pertumbuhan tanpa diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan di Indonesia? Pertama, desain hubungan fiskal antar pusat dan daerah masih menempatkan pembiayaan pembangunan daerah dalam posisi tergantung dengan subsidi dari pusat. Daerah yang miskin sumber daya alam (SDA) umumnya menggantung dana dari DAU (Dana Alokasi Umum). Daerah yang kaya SDA, seperti Riau, Kaltim, Papua, Aceh, porsi bagi hasil SDA lebih menonjol daripada DAU dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Beberapa studi menunjukkan bagi hasil SDA dan DAU ini semakin memperlebar kesenjangan antar daerah di Indonesia.

Kedua, alokasi APBD di banyak daerah, kecuali DIY, lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur daripada belanja publik. Euforia demokrasi dan otonomi daerah memang memungkinkan "elit politik daerah" membelanjakan APBD untuk kepentingan "mesin birokrasi", seperti studi banding, rapat, mobil dinas, perjalanan dinas, dan gaji/tunjangan. Pemerintah pusat mensyalir banyak dana daerah yang ditanamkan dalam SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Bila ini benar, sungguh ironis karena sektor riil membutuhkan kucuran dana segar sementara perbankan mengalami kelebihan likuiditas.

Ketiga, program-program pengentasan kemiskinan terbukti belum mengurangi jumlah penduduk miskin secara substansial. Salah satu sebabnya karena dana dan desain program pengentasan kemiskinan kebanyakan dari pusat, yang banyak dibantu dengan dana dari luar negeri. Subsidi langsung tunai (SLT) hanya "memberi ikan" tidak mendidik si miskin agar bisa "mencari dan menjual ikan". Selain itu, tidak banyak daerah yang mendesain sendiri dan membiayai program anti kemiskinan dari dana APBD.

Dengan data-data dan fakta di atas agaknya pembangunan ekonomi kita sudah terbukti belum "on the right track", tidak berkualitas, dan hanya menguntungkan kelompok tertentu di negeri ini. Daerah memang memiliki pola pembangunan yang tidak selalu sama dengan arahan pemerintah pusat mengingat adanya perbedaan potensi, masalah, sumber pertumbuhan ekonomi, dan alokasi belanja APBD. Bila pembangunan daerah di 464 kabupaten/kota dan 33 propinsi diibaratkan musik, polanya ada yang senang dengan dangdut, jazz, klasik, keroncong, dan kasidahan. Justru pemerintah pusatlah yang seharusnya menjadi "dirigen" agar terjadi koherensi, keterkaitan, dan sinergi pembangunan antar daerah dan antara pusat-daerah.

Dengan sisa waktu sekitar 2,5 tahun, mampukah Presiden SBY dan kabinetnya melakukan perubahan mendasar? Bagaimana Presiden SBY beserta kabinet menjawab masalah di atas amat menentukan perolehan suara pada pemilu 2009 mendatang. Semoga bersama kita bisa sejahtera, bukan menderita bersama.

---

\* Mudrajad Kuncoro adalah Guru Besar FE UGM dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FE UGM; <http://www.mudrajad.com>.

